

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan daerah yang miskin sumber daya alamnya, yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten atau Kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, sehingga proses otonomi daerah belum biasa berjalan sebagaimana mestinya (Azis, 1997). Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Prinsip dasar pemberian otonomi dimaksudkan berdasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar ini maka pemberian otonomi diharapkan pada akhirnya akan lebih memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut (Sumitro, 1995), Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat, kualitas, serta kesejahteraan segenap lapisan masyarakat. Dalam rangka itu pembangunan harus dipandang sebagai suatu rangkaian proses pertumbuhan yang berjalan secara berkesinambungan untuk mewujudkan tujuannya. Pembangunan daerah yang dilaksanakan secara

berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, mandiri dan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah lain yang lebih maju dan secara agregat meningkatkan kesejahteraan bangsa dan Negara secara adil dan merata.

Menurut Kuncoro (1995:334-358) dalam penyelenggaraan otonomi daerah nantinya dikhawatirkan banyak daerah Kabupaten atau Kota yang tidak mampu membiayai kebutuhan daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari kondisi keuangan daerah yang ada selama ini dimana porsi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan bantuan pusat sangat mencolok sekali bahwa lebih separuh dari jumlah Kabupaten atau Kota di Indonesia memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang minim dalam membiayai kebutuhan anggaran daerahnya, yaitu dibawah 15% dari total anggaran secara keseluruhan.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang betul-betul mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di daerah sesuai dengan potensi masing-masing. Untuk melihat apakah daerah telah siap secara finansial untuk menyongsong otonomi daerah, antara lain adalah dengan melihat apakah sumber-sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mampu menutup anggaran belanja daerah yang bersangkutan. Di samping itu anggaran belanja pembangunan yang dialokasikan pada program proyek yang langsung menyentuh sektor ekonomi produktif masyarakat akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat (Uppal, 1986).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena danaini adalah milik pemerintah daerah sendiri sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dan tersebut. Di lain pihak pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena dan itu berasal dari masyarakat daerah setempat yang berhak untuk mendapatkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya.

Data yang diambil dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditulis dalam Buku Dalam Angka dari tahun 2010-2019, menunjukkan bahwa Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kupang tahun ketahun mengalami Peningkatan dan penurunan (*fluktuasi*). Pendapatan Asli Daerah (PAD) didapat dari penjumlahan seluruh jenis pendapatan yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Melihat pembangunan ekonomi kota Kupang menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan karena diimbangi dengan belanja modal daerah dalam meningkatkan infrastruktur dan prasarana seperti pertokoan, mini market, sarana hiburan dan lain-lain sehingga mendorong investor dalam membangun usahanya yang sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak mempunyai peranan penting dalam membiayai keperluan Negara (Vina, dkk. 2010). Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan menunjang pemerintahan daerahnya, pemerintah daerah berhak mengenakan pemungutan pajak daerah kepada seluruh masyarakatnya (Ismail, 2011). Kebijakan pemerintah pusat tentang otonomi secara langsung mengharuskan pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangga daerah itu sendiri. Maka dari hal tersebut pemerintah daerah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan yang menyangkut dengan hak-hak rakyatnya dan mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah untuk mewujudkan pembangunan dan menunjang keperluan pemerintah daerah itu sendiri.

Retribusi daerah dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku (Halim, 2004: 115). Hal yang sama diungkapkan oleh Basuki (2007: 58) Retribusi Daerah merupakan pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk

Undang-undang No. 33, tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatanyang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan

milik swasta atau kelompok masyarakat. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan yaitu bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan Bank dan non Bank, bagian laba atas penyertaan modal atau investasi (Halim, 2004 dalam Nuzulistyan, 2017). Bahwa yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Menurut Halim (2004) dalam Pratomo (2016) mengemukakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah hasil penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan keuangan daerah yang diperoleh dari lain-lain milik pemerintah daerah (Halim dan Kusufi, 2014 dalam Agustin *et al.* 2018). Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa, bunga simpanan bank dan giro, serta penerimaan denda kontraktor. Namun demikian sumber pendapatan ini tergantung dari potensi daerah itu sendiri (Barmin, 2018).

Berikut ini adalah tabel realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah Kota Kupang 2010-2019(dalam ribu rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	Total
2010	11.977.785	9.323.675	5.938.395	9.766.965	37.006.820
2011	22.200.584	11.172.685	8.015.299	6.249.769	47.638.337
2012	31.569.104	17.403.248	9.507.134	7.689.889	66.196.375
2013	41.146.449	21.593.943	9.860.152	8.128.731	80.729.275
2014	56.515.098	22.748.657	12.739.481	21.029.568	113032804
2015	74.560.637	29.352.548	15.665.855	25.575.752	145.154.792
2016	92.667.916	32.193.028	15.097.499	25.490.580	169.449.023
2017	98.639.549	35.978.499	13.421.286	81.098.140	229.137.474
2018	98.817.793	36.283.701	14.422.201	21.967.014	171.490.709
2019	108.476.062	27.196.158	14.378.818	18.904.901	168.955.939

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Kupang

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat PAD Kota Kupang dari tahun 2010 sampai tahun 2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 sampai 2019, PAD Kota Kupang mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan, kontribusi terbesar dari retribusi daerah pada tahun 2010 sampai tahun 2013 dengan total pertumbuhan PAD sebesar 8,27%, 27,60%, 22,78%, dan 54,77% . Akan tetapi pada tahun 2014, PAD Kota Kupang mengalami penurunan, terutama dari pemasukan Lain-Lain PAD yang Sah sehingga pertumbuhan PAD menurun sebesar -30,21%.

Pada tahun 2015 sampai tahun 2017, penerimaan terbesar dari Lain-lain PAD yang Sah dengan pertumbuhan PAD sebesar 3,59%,4,17%, dan 64.56%. Akan tetapi pada tahun 2018, PAD Kota Kupang mengalami penurunan, terutama dari pemasukan Lain-Lain PAD yang Sah sehingga pertumbuhan PAD menurun sebesar -

30,21%. Dan pada tahun 2019, PAD Kota Kupang kembali mengalami peningkatan, kontribusi terbesar dari penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah dengan total pertumbuhan sebesar 15,52%.

Berdasarkan uraian di atas terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, maka Penulis merasa tertarik untuk meneliti Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang dan menuangkan hasilnya dalam karya ilmiah yang berjudul: **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Kupang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Gambaran Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kota Kupang?
2. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kupang?
3. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kupang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kota Kupang.

2. Untuk mengetahui Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kupang.
3. Untuk mengetahui Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kupang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kupang:

1. Bagi Instansi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan menambah referensi di perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

2. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam upaya mencari pendekatan dan strategi terbaik dalam melakukan upaya peningkatkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) demi meningkatkan perekonomian masyarakat.

3. Bagi Peneliti Lanjutan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah wawasan mengenai ilmu ekonomi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Juga untuk menjadi bahan referensi bagi Peneliti yang akan datang yang sama berkaitan dengan judul dan lain sebagainya dalam Penelitian ini.